



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2 /SEK/OT.01.1/1/2020

6 Januari 2020

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020

Yth.

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penilaian Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawahnya, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan **komitmen pimpinan** dan **komitmen bersama**, yaitu Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Aparatur Sipil Negara harus terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*);
2. **Peningkatan kinerja pelayanan**, aparatur peradilan harus bersemangat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan *hospitality* (senyum, sapa, salam) dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
3. **Menciptakan program/kegiatan/inovasi yang menyentuh masyarakat**, yaitu program-program/kegiatan/inovasi yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga peradilan sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir untuk masyarakat;
4. **Monitoring dan Evaluasi**, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan;
5. Pelaksanaan **manajemen media** yang baik, melalui media situs resmi Pengadilan, media cetak, media elektronik, dan lain-lain secara berkelanjutan;
6. Bagi 114 (seratus empat belas) Pengadilan yang belum lolos memperoleh predikat WBK, akan diusulkan secara otomatis dengan mengirimkan kembali Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung setelah dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan demi keberhasilan unit-unit kerja dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi dalam upaya untuk meraih predikat WBK;
7. Untuk Pengadilan yang telah memperoleh predikat WBK pada tahun 2018 dan 2019 agar diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM secara berjenjang;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan satuan kerja di wilayah hukumnya yang berpotensi/layak memperoleh predikat WBK/WBBM kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing, untuk diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal

(TPI) untuk diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

9. Demi keselarasan langkah dan kebijakan guna memberikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM diharapkan agar mengikuti rencana aksi sesuai lampiran pada surat ini;
10. Bagi Pengadilan Tingkat Banding yang membutuhkan pendampingan/sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk satuan kerja di wilayah hukumnya dapat membuat surat permintaan pendampingan yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Edi Yuniadi (081319042632) dan Tiroi Siahaan (0811171259).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung,

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 2 /SEK/OT.01.1/1/2020
 Tanggal : 6 Januari 2020

**TARGET PRIORITAS DAN OUTPUT YANG DIHARAPKAN DARI
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
 BERADA DIBAWAHNYA**

NO	TARGET PRIORITAS	RENCANA AKSI	WAKTU	OUTPUT YANG DIHARAPKAN
1.	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Januari 2020	SK Sekretaris Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan/Kepala Pengadilan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
2.	Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Januari 2020	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM disertai Target dan Output serta <i>Roadmap</i> Pembangunan
3.	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i>	Januari 2020	Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
4.	Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Januari s/d Juni 2020	Pembuatan <i>banner</i> , poster, stiker, manajemen media dll
		Survey Kepuasan Masyarakat	Februari s/d Juni 2020	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Pemberian <i>Reward</i> kepada Pegawai Terbaik	Januari s/d Juni 2020	Penetapan Pegawai Terbaik Per Triwulan
		Pengusulan Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Akhir Januari 2020	Pengusulan secara berjenjang kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung

		Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Januari s/d April 2020	Oleh Tim Penilai Internal (TPI) pada Badan Pengawasan
		Pengusulan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada Kemenpan-RB	Paling Lambat 31 Mei 2020	Diusulkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Pelaksanaan Desk Evaluation oleh Tim Kemenpan-RB	Juni s/d Oktober 2020	Oleh Tim Evaluator KemepanRB
		Penilaian dan Evaluasi <i>on the spot</i> oleh Tim Kemenpan-RB	Oktober s/d Desember 2020	Oleh Tim Penilai dan Evaluator KemepanRB
5.	Pengumuman satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dan Pelopor Perubahan	-	Desember 2020	-